

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan menjadi aspek utama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, individu memperoleh pengetahuan dan kompetensi untuk meningkatkan kesejahteraan serta berkontribusi dalam pembangunan nasional (L. D. Sanga., 2023). Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31, yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Pendidikan anak usia dini berperan penting dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia. Melalui proses tersebut, anak memperoleh pengetahuan serta kesadaran diri yang mendukung perumusan tujuan hidup yang konstruktif. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam pembangunan pendidikan, termasuk melalui implementasi program wajib belajar sembilan tahun yang kemudian diperluas menjadi dua belas tahun (Sintha et al., 2021). Meskipun demikian, seperti keterlambatan masuk sekolah dasar, angka putus sekolah, serta ketimpangan akses ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Jannah, 2025). Strategi efektif untuk meningkatkan kesadaran pendidikan harus melibatkan pendekatan multidimensi, termasuk penggunaan media massa dan digital untuk menyebarkan informasi tentang pentingnya Pendidikan (UNESCO, 2020).

Putus sekolah dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup kurangnya motivasi untuk belajar, kondisi kesehatan, dan kebutuhan

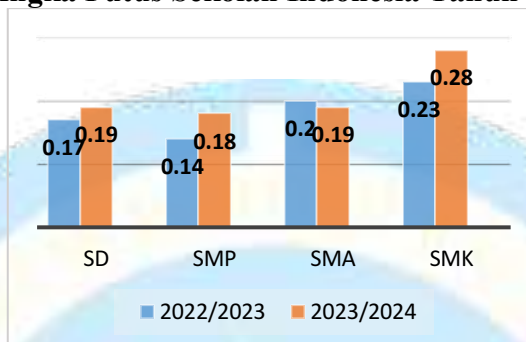
khusus, sedangkan faktor eksternal mencakup keterbatasan ekonomi keluarga, sulitnya akses ke sekolah, lingkungan sosial, tingkat pendidikan orang tua, dan pengaruh budaya (Yaneri et al., 2022). Peningkatan angka putus sekolah berdampak pada terbatasnya peluang kerja bagi individu tanpa pendidikan memadai, sehingga meningkatkan risiko pengangguran dan pekerjaan tidak stabil. Kondisi ini turut memperbesar tingkat kemiskinan akibat rendahnya pendapatan dan kesempatan ekonomi (Pemerintah Kabupaten Bantul, 2025).

Tingginya angka putus sekolah berdampak pada penurunan produktivitas dan daya saing, serta menghambat pembentukan tenaga kerja terampil. Selain itu, kondisi ini berpotensi meningkatkan kriminalitas akibat lemahnya pendidikan karakter dan terbatasnya pembinaan moral dari keluarga maupun sekolah. Penanganannya memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup aspek akses pendidikan, keluarga dan budaya pendidikan, serta sumber daya pendidikan. Dari sisi akses, perluasan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan penting untuk meningkatkan keterjangkauan, terutama pada jenjang dasar. Sementara itu, pada aspek keluarga dan budaya, diperlukan peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang (Pemerintah Kabupaten Bantul, 2025).

Di Indonesia, pemerintah telah memperluas akses pendidikan melalui kebijakan wajib belajar 12 tahun serta program Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Namun, putus sekolah masih menjadi isu krusial yang ditandai dengan berhentinya peserta didik pada jenjang SD, SMP, atau SMA. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab kolektif antara pemerintah dan masyarakat. Data Kementerian Pendidikan Dasar

dan Menengah menunjukkan bahwa pada periode 2024–2025 jumlah siswa putus sekolah secara nasional masih tinggi, yaitu 38.540 siswa pada jenjang SD dan 12.210 siswa pada jenjang SMP (Kemendikdasmen, 2024).

Tabel 1.1 Data Angka Putus Sekolah Indonesia Tahun Ajaran 2023/2024



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS, 2024)

Data menunjukkan bahwa pada tahun ajaran 2023/2024, angka putus sekolah jenjang SD di Indonesia meningkat dari 0,17% menjadi 0,19%. Pada jenjang SMP tercatat sekitar 0,18%, sedangkan SMK mencapai 0,28%. Temuan ini menegaskan bahwa putus sekolah masih menjadi tantangan serius dalam sistem pendidikan nasional, terutama di wilayah terpencil yang dipengaruhi faktor ekonomi, keterbatasan akses, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan.

Berbeda dengan kebijakan nasional, Pemerintah Kabupaten Bintan masih menerapkan program wajib belajar 9 tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Regulasi tersebut menegaskan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun (Pasal 7 ayat (3) huruf a) serta kewajiban Bupati untuk menjamin keberlangsungannya di daerah (Pasal 11 ayat (1)) (Perda, 2018).

Penerapan kebijakan tersebut dapat dipahami karena program wajib belajar 12 tahun berkaitan dengan jenjang pendidikan menengah atas yang dalam pembagian urusan pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sedangkan pemerintah kabupaten memiliki tanggung jawab pada penyelenggaraan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Oleh karena itu, fokus kebijakan pendidikan di Kabupaten Bintan masih diarahkan pada pemenuhan dan keberlanjutan wajib belajar 9 tahun sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah.

Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan merupakan instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bintan, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama. Dalam penanganan anak putus sekolah di Kabupaten Bintan dilaksanakan melalui berbagai kebijakan dan program pendidikan. Dinas ini berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan, pemerataan akses belajar, serta pengembangan sumber daya manusia melalui berbagai kebijakan dan program pendidikan. Selain itu, Dinas Pendidikan juga berfokus pada penyediaan fasilitas sekolah, pengelolaan tenaga pendidik, pengawasan pembelajaran, serta pemberian dukungan pendidikan bagi masyarakat.

Peraturan Bupati Bintan Nomor 61 Tahun 2023 pada Pasal 3 menjelaskan tentang susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri atas: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat terdiri atas: subbagian umum dan kepegawaian; c. Bidang pembinaan pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan nonformal terdiri atas: 1. Seksi kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan

nonformal; 2. Seksi peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan nonformal; d. Bidang pembinaan Sekolah Dasar terdiri atas: 1. Seksi kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Dasar; dan 2. Seksi peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar; e. Bidang pembinaan Sekolah Menengah Pertama terdiri atas: 1. Seksi kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama; dan 2. Seksi peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama; f. Bidang pembinaan ketenagaan terdiri atas: 1. Seksi pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar; dan 2. Seksi pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama; g. Kelompok jabatan fungsional; h. Satuan Pendidikan.

Pasal 4 Kepala Dinas memiliki tugas dan fungsi untuk: 1. Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pendidikan; 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut: a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan Daerah; b. penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; c. pengelolaan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; d. pengelolaan dan fasilitas penerbitan perizinan pendidikan Daerah; e. pembinaan Bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah; f. penyelenggaraan urusan administrasi Dinas; g. pemantauan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan urusan di bidang pendidikan Daerah; h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 5 Sekretariat memiliki tugas dan fungsi untuk: 1. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas di bidang Kesekretarian; 2. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan pengordinasian penyusunan kebijakan teknis di bidang pendidikan Daerah; b. penyelenggaraan urusan administrasi umum dan kepegawaian; c. penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan; d. penyelenggaraan urusan penyusunan perencanaan dan program; e. pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan Daerah; f. pengordinasian dan fasilitasi pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan Daerah; g. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum di bidang pendidikan Daerah; h. penyusunan dan koordinasi bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan Daerah; i. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan lingkup Dinas; j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait bidang tugas dan fungsinya.

Berdasarkan kondisi di Kabupaten Bintan, jenjang SD dan SMP merupakan kelompok yang paling rentan mengalami putus sekolah. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan ekonomi keluarga, rendahnya kesadaran pendidikan orang tua, serta lemahnya motivasi belajar anak, sehingga penelitian ini difokuskan pada kedua jenjang tersebut. Selain itu, karena termasuk dalam program wajib belajar 9 tahun, intervensi pada tahap ini dinilai strategis untuk mencegah putus sekolah pada jenjang berikutnya .

Sesuai data dari Pusat Data dan Teknologi informasi Kementarian Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa di Provinsi Kepulauan Riau masih terdapat 23.032 Anak Tidak Sekolah (ATS) (Renstra BPMP, 2025). Dalam penelitian ini, terdapat perbedaan bahwa anak tidak sekolah (ATS) dan anak putus sekolah merupakan dua istilah yang berbeda. Anak tidak sekolah merupakan kelompok yang lebih luas, mencakup anak yang belum pernah bersekolah, anak yang putus sekolah (drop out), serta anak yang lulus tetapi tidak melanjutkan pendidikan. Sementara itu, anak putus sekolah adalah anak yang sebelumnya pernah mengikuti pendidikan formal namun berhenti sebelum menyelesaikan jenjang pendidikannya. Oleh karena itu, penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada anak putus sekolah, sedangkan data anak tidak sekolah digunakan sebagai gambaran umum kondisi pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau.

Berikut rincian data anak tidak sekolah per kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau Baseline Data September 2025.

Tabel 1.2 Data anak tidak sekolah per kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau

Wilayah	BPB	DO Dikdas	DO Dikmen	SD- LTM	SMP- LTM	Jumlah
Bintan	553	565	476	173	309	2.076
Karimun	985	854	698	439	816	3.792
Natuna	195	169	153	112	130	759
Lingga	339	386	235	343	416	1.719
Kep. Anambas	92	159	137	78	152	618
Batam	6.038	2.187	1.582	1.089	1.416	12.312
Tanjungpinang	649	356	411	130	210	1.756

Sumber: BPMP Prov. Kepulauan Riau

Keterangan:

BPB : Belum Pernah Bersekolah

DO : Drop Out
LTM : Lulus Tidak Melanjutkan

Berdasarkan data Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kepulauan Riau (2025), putus sekolah masih menjadi isu krusial di Kepulauan Riau dengan variasi tingkat kejadian antar daerah. Kota Batam mencatat angka tertinggi (12.312 anak) yang dipengaruhi oleh besarnya populasi serta aktivitas ekonomi dan industri yang mendorong migrasi. Angka signifikan juga terdapat di Kabupaten Karimun (3.792), Kota Tanjungpinang (1.756), Kabupaten Lingga (1.719), Kabupaten Natuna (759), dan Kabupaten Kepulauan Anambas (618). Sementara itu, Kabupaten Bintan juga menunjukkan angka relatif tinggi (2.076 anak), sehingga menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pendidikan daerah. Distribusi kasus menunjukkan bahwa putus sekolah terjadi pada tingkat SD dan SMP, yang mengindikasikan belum optimalnya keberlanjutan pendidikan di masyarakat.

Terjadinya putus sekolah di wilayah ini tidak dapat dilihat dari satu sudut pandang saja, melainkan merupakan akibat dari akumulasi berbagai persoalan yang saling berkaitan mulai dari keterbatasan ekonomi hingga faktor sosial budaya masyarakat setempat. Berikut adalah analisis mendalam mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya anak putus sekolah:

1. Faktor Ekonomi dan Dorongan untuk Bekerja

Meskipun pemerintah daerah telah mengupayakan program sekolah gratis untuk tingkat dasar dan menengah, kemiskinan struktural tetap menjadi tembok tebal. Biaya hidup yang tinggi di wilayah kepulauan membuat ongkos transportasi harian,

uang saku, dan kebutuhan dasar sekolah lainnya tetap menjadi beban berat. Pada titik ini, pendidikan sering kali dikorbankan demi memenuhi kebutuhan isi perut keluarga hari ini.

- a. Membantu Nafkah Keluarga: Di beberapa wilayah yang dekat dengan sektor pesisir, perkebunan, atau perdagangan, beberapa anak memilih atau terpaksa berhenti sekolah untuk bekerja membantu ekonomi orang tua mereka.

2. Rendahnya Motivasi Internal dan Minat Belajar Anak

- a. Rasa Malas dan Membolos: Keinginan dari dalam diri anak untuk bersekolah kerap kali luntur karena pengaruh lingkungan bermain.
- b. Anak-anak yang sering membolos tanpa alasan yang jelas lama-kelamaan merasa tertinggal secara akademik, sehingga mereka memilih mengundurkan diri atau terkena sanksi *drop out* karena ketidakhadiran yang menumpuk.

3. Kurangnya Pengawasan dan Dukungan Orang Tua

Peran keluarga sangat menentukan keberlanjutan pendidikan anak. Ditemukan kasus di mana:

- a. Kurang Perhatian: Orang tua terlalu sibuk bekerja sehingga kurang memantau perkembangan akademik dan kehadiran anak di sekolah.

- b. Ikut Orang Tua Pindah: Beberapa anak terpaksa putus sekolah karena harus ikut orang tua pindah ke luar daerah (misalnya ke pulau lain) secara mendadak, tanpa mengurus surat pindah sekolah secara resmi, sehingga status mereka di sekolah asal menjadi tidak jelas dan akhirnya dianggap putus sekolah.
- c. Pendidikan Orang Tua: Masih adanya pemikiran sebagian orang tua yang kurang memahami pentingnya menuntaskan wajib belajar 12 tahun bagi masa depan anak.

5. Faktor Lingkungan Sosial dan Pergaulan

Lingkungan pertemanan di luar sekolah yang kurang kondusif sangat cepat memengaruhi psikologis remaja. Jika anak bergaul dengan kelompok remaja yang juga tidak bersekolah atau sudah bekerja, mereka akan lebih mudah tergiur untuk meninggalkan bangku sekolah.

- a. Pernikahan Usia Dini: Masalah ini sering kali menjadi ujung dari pergaulan bebas atau penyelesaian jalan pintas atas masalah ekonomi keluarga. Ketika seorang anak menikah di usia dini, hak pendidikannya hampir pasti terputus karena mereka dipaksa masuk ke fase kedewasaan untuk mengurus rumah tangga atau bekerja, ditambah lagi adanya stigma sosial dan regulasi sekolah yang belum sepenuhnya akomodatif terhadap siswa yang sudah menikah

Untuk mengatasinya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengimplementasikan program seperti Program Indonesia Pintar (PIP) bagi keluarga kurang mampu dan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) guna meningkatkan mutu dan infrastruktur pendidikan. Upaya ini juga dilakukan melalui kolaborasi dengan organisasi nonpemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas (Renstra BPMP, 2025).

Kondisi serupa juga terlihat di Provinsi Kepulauan Riau. Pada tahun 2024, 3.379 siswa SD di provinsi ini mengalami putus sekolah, terutama di daerah pedesaan dan pulau-pulau kecil yang sulit dijangkau (Kemendikdasmen, 2024). Salah satu daerah yang menghadapi permasalahan tersebut adalah Kecamatan Bintan Timur, yang meskipun memiliki nilai sosial kebersamaan yang kuat, menghadapi tantangan rendahnya minat belajar anak dan remaja. Kondisi ini bersifat menetap dan berdampak pada penurunan motivasi, capaian akademik, serta keinginan melanjutkan pendidikan (Novriasyah Putra, Y. S. Adiputra, 2021).

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan dua indikator utama yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan pendidikan, khususnya pada jenjang SD dan SMP dalam pelaksanaan program wajib belajar. APK mencerminkan kapasitas daya tampung pendidikan tanpa mempertimbangkan usia peserta didik, sedangkan APM menunjukkan tingkat partisipasi anak yang bersekolah sesuai dengan kelompok usia pada jenjang pendidikan yang semestinya (Dinas Pendidikan, 2025). Kedua indikator tersebut penting untuk menganalisis akses, ketepatan, dan keberlanjutan

pendidikan. Dalam penelitian ini, APK dan APM digunakan sebagai gambaran kondisi partisipasi pendidikan di Kabupaten Bintan. Tingginya APK menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap pendidikan sudah cukup baik, sedangkan APM menggambarkan sejauh mana anak usia sekolah mengikuti pendidikan sesuai jenjangnya. Apabila masih terdapat anak yang putus sekolah, maka partisipasi pendidikan, khususnya APM, dapat menurun karena anak usia sekolah tidak lagi mengikuti pendidikan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, data APK dan APM menjadi indikator yang mendukung pentingnya strategi Dinas Pendidikan dalam mengurangi angka putus sekolah guna meningkatkan keberlanjutan pendidikan.

Berdasarkan data tahun 2025 di Provinsi Kepulauan Riau, APK jenjang SD mencapai 109,49% dan SMP 95,78%, sementara APM SD sebesar 98,20% dan SMP 83,55%. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa meskipun akses pendidikan dasar relatif tinggi, keberlanjutan ke jenjang SMP masih belum optimal. APK SD yang melebihi 100% menunjukkan adanya ketidaksesuaian usia peserta didik, sedangkan rendahnya APM SMP mencerminkan masih terbatasnya partisipasi pendidikan pada jenjang tersebut (Dinas Pendidikan, 2025).

Fenomena putus sekolah juga terjadi di tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Bintan, khususnya pada jenjang SD dan SMP. Kondisi ini dipengaruhi oleh tekanan ekonomi keluarga, rendahnya pendidikan orang tua, serta kecenderungan anak memasuki dunia kerja sejak usia sekolah. Kesenjangan antara tingginya APK dan rendahnya APM, terutama pada jenjang SMP, mengindikasikan bahwa tantangan tidak hanya terletak pada akses, tetapi juga pada keberlanjutan

pendidikan hingga tuntas. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang terstruktur dan berkelanjutan dari Dinas Pendidikan (Renstra BPMP, 2025).

Tabel 1.3 Data Jumlah Sekolah SD dan SMP di Kabupaten Bintan 2025

No	Kecamatan	Jenjang Pendidikan		Jumlah
		SD	SMP	
1.	Bintan Pesisir	5	3	8
2.	Bintan Timur	16	5	21
3.	Bintan Utara	7	6	13
4.	Gunung Kijang	8	3	11
5.	Mantang	4	2	6
6.	Seri Koala Lobam	7	2	9
7.	Tambelan	7	1	8
8.	Teluk Bintan	9	4	13
9.	Teluk Sebong	8	5	13
10.	Toapaya	2	5	7

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan

Berdasarkan Tabel 1.3, dapat diketahui bahwa sebaran fasilitas pendidikan jenjang SD dan SMP di Kabupaten Bintan menunjukkan perbedaan jumlah di 10 kecamatan. Secara keseluruhan, jumlah sekolah dasar lebih mendominasi dibandingkan sekolah menengah pertama. Kecamatan Bintan Timur menjadi wilayah dengan jumlah sekolah terbanyak, yaitu 16 SD dan 5 SMP, didukung oleh tingginya kepadatan penduduk dan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Sementara itu, Kecamatan Toapaya memiliki jumlah SD paling sedikit dan Kecamatan Tambelan memiliki jumlah SMP paling rendah.

Meskipun Kecamatan Bintan Timur memiliki fasilitas pendidikan paling banyak, wilayah ini masih menghadapi tingginya angka anak putus sekolah dan lulus tidak melanjutkan (LTM), khususnya pada jenjang SD ke SMP. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan putus sekolah tidak hanya dipengaruhi oleh

keterbatasan fasilitas pendidikan, tetapi juga oleh faktor ekonomi, sosial, motivasi belajar, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kondisi tersebut menjadi dasar penting untuk menganalisis strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan dalam mengatasi permasalahan anak putus sekolah di Kecamatan Bintan Timur.

Berbagai faktor tersebut, Dinas Pendidikan telah mengupayakan penurunan angka putus sekolah melalui penyaluran bantuan pendidikan guna meringankan beban keluarga kurang mampu (Novriasyah Putra, Y. S. Adiputra, 2021). Selain itu, sosialisasi pendidikan diperluas melalui kerja sama dengan pemerintah kecamatan di seluruh Kabupaten Bintan agar informasi mengenai pentingnya pendidikan dan program bantuan dapat disampaikan secara lebih efektif. Kegiatan sosialisasi tersebut telah dilaksanakan beberapa kali dengan menyesuaikan jadwal kegiatan belajar di masing-masing sekolah serta diselenggarakan langsung di lingkungan sekolah agar penyampaian informasi dapat menjangkau peserta didik dan pihak terkait secara lebih optimal. Sosialisasi ini sudah dilakukan beberapa kali menyesuaikan jadwal di sekolah.

Tabel 1.4 Data Angka Putus Sekolah Kabupaten Bintan Tahun 2025

No	Kecamatan	Jenjang Pendidikan		Jumlah
		SD	SMP	
1.	Bintan Pesisir	28	15	43
2.	Bintan Timur	113	164	277
3.	Bintan Utara	21	31	52
4.	Gunung Kijang	34	29	63
5.	Mantang	21	26	47
6.	Seri Koala Lobam	14	14	28
7.	Tambelan	23	22	45
8.	Teluk Bintan	18	28	46
9.	Teluk Sebong	18	36	54
10.	Toapaya	9	21	30

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan

Dari data yang diperoleh, Kecamatan Bintan Timur mencatat jumlah putus sekolah tertinggi, yaitu 113 siswa pada jenjang SD dan 164 siswa pada jenjang SMP (total 277 siswa). Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut memerlukan perhatian lebih dibandingkan kecamatan lain, sekaligus mengindikasikan adanya permasalahan kompleks terkait akses, kualitas, dan keberlanjutan pendidikan. Tingginya angka tersebut juga mencerminkan kesenjangan antara kebijakan pendidikan dan implementasinya di lapangan.

Pemilihan Kecamatan Bintan Timur sebagai lokasi penelitian didasarkan pada tingginya angka putus sekolah yang mencerminkan kompleksitas permasalahan pendidikan di wilayah tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa isu putus sekolah tidak hanya menjadi persoalan pada tingkat nasional dan provinsi, tetapi juga tampak secara nyata pada tingkat lokal. Selain itu, adanya kesenjangan dalam kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, baik pada jenjang dasar maupun menengah, menjadi pertimbangan utama. Oleh karena itu, penelitian di wilayah ini diharapkan mampu mengidentifikasi penyebab secara mendalam serta menghasilkan rekomendasi yang lebih tepat sasaran dalam upaya menekan angka putus sekolah di Kabupaten Bintan.

Mayoritas kepala keluarga di Kecamatan Bintan Timur bekerja di sektor informal seperti buruh harian, nelayan kecil, ojek, dan pedagang, dengan penghasilan yang tidak tetap. Kondisi ini menempatkan keluarga pada posisi rentan, di mana pendapatan terbatas diprioritaskan untuk kebutuhan dasar, sehingga biaya

pendidikan meskipun telah dibantu melalui program BOS dan PIP masih dianggap sebagai beban tambahan. Karakteristik wilayah pesisir yang bergantung pada kondisi cuaca juga menyebabkan pendapatan nelayan tidak stabil, terutama saat musim angin utara atau cuaca buruk. Situasi ini mendorong anak untuk turut bekerja membantu ekonomi keluarga, yang pada akhirnya menurunkan minat melanjutkan pendidikan karena pekerjaan dianggap memberikan manfaat ekonomi yang lebih cepat dibandingkan pendidikan formal (Novriasyah Putra, Y. S. Adiputra, 2021).

Tingginya angka putus sekolah tentu membawa dampak jangka panjang, mulai dari rendahnya peluang kerja, meningkatnya angka kemiskinan, melemahnya daya saing, hingga munculnya berbagai persoalan sosial seperti pekerja anak dan pernikahan dini. Dengan demikian, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan memiliki tanggung jawab strategis untuk mengantisipasi dan menekan angka putus sekolah melalui kebijakan dan program yang lebih terarah, dan perlu menyusun strategi yang komprehensif. (Ardiansya Putra., 2025).

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Rokhmaniyah (2021) menegaskan bahwa keterlibatan keluarga, sekolah, dan komunitas berperan krusial dalam mencegah putus sekolah. Sejalan dengan Septiarti, Nurhaliza, dan Pratiwi (2022) menunjukkan bahwa rendahnya motivasi orang tua di wilayah pinggiran dipengaruhi oleh minimnya kesadaran terhadap nilai strategis pendidikan jangka panjang. Oleh karena itu, penurunan angka putus sekolah di Kecamatan Bintan Timur memerlukan pendekatan komprehensif, tidak hanya melalui penyediaan fasilitas dan bantuan pendidikan, tetapi juga melalui sosialisasi, kampanye berbasis

komunitas, serta penguatan peran keluarga sebagai agen utama penanaman nilai pendidikan.

Penelitian ini penting dilakukan karena beberapa pertimbangan mendasar. Tanpa strategi yang tepat dan terarah dari Dinas Pendidikan, angka putus sekolah di Kabupaten Bintan berpotensi meningkat, terutama pada tingkat SD dan SMP sebagai bagian dari program wajib belajar 9 tahun. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai upaya yang telah dilakukan serta aspek yang perlu diperhatikan dalam menekan angka putus sekolah, meningkatkan pemerataan akses pendidikan dasar, dan meminimalkan dampak lanjutan seperti kemiskinan dan kerentanan sosial.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul **“Strategi Dinas Pendidikan dalam mengurangi Angka Putus Sekolah di Kabupaten Bintan Tahun 2025 (Studi Kasus Bintan Timur)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana strategi Dinas Pendidikan dalam mengurangi angka putus sekolah di Kabupaten Bintan Tahun 2025 studi kasus Bintan Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk menganalisis strategi Dinas Pendidikan dalam mengurangi angka putus sekolah di Kabupaten Bintan Tahun 2025 studi kasus Bintan Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pemerintahan dan pendidikan masyarakat, melalui kajian mengenai strategi Dinas Pendidikan dalam menekan angka putus sekolah. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Bintan, khususnya Dinas Pendidikan, dalam menyusun dan mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mencegah dan mengurangi angka putus sekolah serta meningkatkan pemerataan layanan pendidikan.

2. Bagi Sekolah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi sekolah dalam memperkuat upaya pencegahan putus sekolah melalui peningkatan kerja

sama dengan orang tua, pemantauan peserta didik yang berisiko, serta pelaksanaan program pendampingan yang lebih optimal.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya orang tua, mengenai pentingnya pendidikan serta mendorong partisipasi aktif dalam mendukung keberlanjutan pendidikan anak agar tidak mengalami putus sekolah.

